

ISSN : 1907-4336

Jurnal
Al-Fitrah

Jurnal Ilmu-ilmu Pendidikan

Volume 6 : No. 1 April 2011

Teori Pembelajaran Sebagai Landasan Kinerja Profesional Guru
Hj. St. Rodliyah

Motivasi dan Disiplin Sebagai Strategi meraih Prestasi Belajar
Muhammad Ali Makki

Netralitas Sains dan Upaya Dunia Pendidikan Islam
Mewujudkan Saintis Islam
Izzatul Laila

Mengikis Gap Antara Idealisme dan Realita
Kustyarini

Eksistensi Bimbingan Konseling dalam Dunia Pendidikan
Sarwan

ISSN : 1907-4336

Jurnal
Al-Fitrah

Jurnal Ilmu-ilmu Pendidikan

Vol. 6 No. 1 April 2011

Jurnal *Al-Fitrah*

Jurnal Ilmu-ilmu Pendidikan

Pelindung

Moh. Khusnuridlo

Penanggung Jawab

Syamsun Ni'am

Mashudi

Pimpinan Redaksi

Sarwan

Sekretaris Redaksi

HM Syamsudini

Dewan Redaksi

H. Abdul Halim Soebahar

Hj. Titiek Rohana H

H. Sofyan Tsauri

H. Sukarno

Sofkhatin Khumaidah

Desain Cover / Lay Out

Zeiburhanus Saleh

Staf Redaksi

Daud Rosyidi

Musyarofah

Alamat Redaksi

Jurusan Tarbiyah

Progam Studi Pendidikan

Agama Islam (PAI)

STAIN Jember

Jl. Jumat No.94 Mangli

Jember

Kode Pos : 68136 Jatim

Telp: (0331) 487550

Fax: (0331) 424005

E-mail:

alfitrah.stainjbr@gmail.com

Jurnal al-Fitrah diterbitkan oleh jurusan Tarbiyah Progam Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Jember sebagai media informasi dan diskursus kajian ilmu-ilmu pendidikan agama Islam. Jurnal al-Fitrah terbit setiap bulan April. Dan ini merupakan terbitan dengan Volume 6 No. 1 April 2010

Redaksi mengundang para ahli dan praktisi untuk menulis berbagai aspek kajian, penelitian artikel atau tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pendidikan dan budaya Islam, tulisan yang dimuat tidak selalu mencerminkan pendapat redaksi dan naskah format penulisan dapat dilihat pada halaman kulit dalam-belakang tiap edisi.

Redaksi berhak mengedit tulisan yang masuk tanpa menghilangkan esensinya. Tulisan dikirim dalam bentuk *prin out* dan CD/ *flashdisk* ke alamat redaksi.

DAFTAR ISI

Teori Pembelajaran Sebagai Landasan Kinerja

Professional Guru

Hj. St. Rodliyah 598

Motivasi dan Disiplin Sebagai Strategi Meraih Prestasi Belajar

Muhammad Ali Makki 609

Netralitas Sains dan Upaya Dunia Pendidikan Islam Mewujudkan Sainis Islam

Izzatul Laila 623

Mengikis Gap Antara Idealisme dan Realita

Kustyarini 640

Eksistensi Bimbingan Konseling dlm Dunia Pendidikan

Sarwan..... 649

Potret Krisis Moneter Indonesia dan Ekonomi Rakyat

Maftukhin 660

Pemikiran Ulama Mesir tentang Sekularisme

Mohammad Salik..... 668

Ibrahim Hosen: Pembaharu Hukum Islam di Indonesia

Muh Sholahuddin..... 680

Memotret Fulldya School

Nuruddin..... 697

PEMIKIRAN ULAMA` MESIR TENTANG SEKULARISME (Respon atas Gagasan dan Kebijakan Mustafa Kemal)

*Mohamad Salik**

(Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstract

Perbincangan mengenai sekularisme selalu mengundang perhatian di kalangan umat Islam baik dari mereka yang setuju ataupun yang menolaknya. Munculnya gagasan sekularisme sebenarnya tidak lepas dari bagian upaya pembaharuan dalam Islam untuk mengatasi kemundurannya. Salah satu di antara mereka ada yang dengan berupaya meniru Barat atau yang dikenal dengan kelompok sekuler. Mustafa Kemal adalah merupakan tokoh yang tidak hanya memiliki gagasan "akademis" sebagaimana umumnya para tokoh yang lain, ia tercatat sebagai tokoh yang pertama kali menerapkan kebijakan sekularisme di negeri Muslim yaitu Turki. Berbagai respon muncul terhadap kebijakan tersebut baik yang bernada setuju maupun yang menolaknya. Tulisan ini ingin mengkaji bagaimana respon para ulama` Mesir atas kebijakan sekularisme tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata kunci: Sekularisme, Intelektual Muslim Mesir, Mustafa Kemal

A. Pendahuluan

Perbincangan mengenai persoalan sekularisme di dalam Islam selalu mendatangkan polemik dan memunculkan berbagai respon dan reaksi di kalangan umat Islam baik dari kalangan yang setuju maupun yang menolak. Hal tersebut karena di kalangan umat Islam belum atau tidak ada kata sepakat mengenai istilah atau konsep tersebut.

Di dalam Islam, munculnya gagasan sekularisme tidak lepas dari bagian upaya pembaharuan dalam Islam untuk mengatasi kemundurannya. Di kalangan umat Islam sedikitnya ada dua hal yang menjadi penyebab mundurnya umat Islam. *Pertama*, kemunduran umat Islam adalah akibat dari

umat Islam tidak mengamalkan ajaran Islam yang murni. *Kedua*, karena keunggulan Barat dalam berbagai bidang, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena keunggulan ini, menyebabkan Barat mampu mendominasi dan menguasai wilayah-wilayah Islam.

Kedua faktor di atas, mengakibatkan munculnya para tokoh Muslim yang berusaha untuk mencari jalan mengatasinya. Berbagai pandangan muncul di antara para tokoh Muslim tersebut. Di antara pandangan tersebut ada yang bersikap anti Barat, ada yang berusaha menggali nilai-nilai ajaran Islam dan mengadaptasikannya sesuai dengan kondisi

*) Dosen Tetap IAIN Surabaya

dan situasi zaman, dan ada pula yang berusaha untuk meniru Barat. Yang terakhir inilah yang biasa disebut dengan kelompok sekuler.

Di tengah-tengah pro-kontra umat Islam mencari format pembaharuan yang tepat bagi umat Islam untuk mengatasi kemundurannya, Mustafa Kemal pemimpin Turki yang merupakan negara dalam catatan sejarah pernah menjadi negara Islam terbesar, ia tidak hanya ikut memperdebatkannya secara “akademisi”, tetapi telah benar-benar merubah negara tersebut menjadi negara sekuler, dengan sistem pembaharuannya meniru model Barat. Tentu hal tersebut menimbulkan respon dan reaksi dari berbagai kalangan umat Islam terutama dari kalangan yang menolaknya.

Tulisan ini ingin menelusuri mengenai bagaimana respon para ulama Mesir terhadap gagasan dan kebijakan Mustafa Kemal tersebut. Ada beberapa alasan kenapa penulis tertarik untuk menjadikan Mesir sebagai objek dalam kajian ini, sebagaimana dikatakan oleh Amin Rais, *Pertama*, Mesir merupakan salah satu Negeri Muslim yang paling dulu berinteraksi dengan dunia Barat yaitu pada abad ke-18 dengan ekspedisi Napoleon Bonaparte. *Kedua*, Kairo merupakan salah satu *center of excellence* dunia Islam, di mana sejak berabad-abad yang silam dan sampai sekarang masih tetap menjadi pusat pemikiran Islam yang pengaruhnya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Al-Azhar adalah merupakan produsen ulama yang sangat tangguh. *ketiga, intelektual warfare* atau peperangan intelektual antara Barat dan Islam berlangsung sangat sengit di Mesir, dan dalam menghadapi invasi ideologi Barat, *front* Islam di Mesir mengalami semacam “perpecahan” dan masing-masing aliran terlibat dalam polemik intelektual yang sangat menarik

dan menyuguhkan paradigma pemikirannya sesuai dengan kacamata masing-masing (Rais, 1995: ix-x).

Lebih lanjut mengenai hal di atas akan diuraikan pada bagian berikut

B. Sekularisme : Sebuah Paradigma

Istilah “sekuler” diambil bahasa Latin, yakni dari kata *Saeculum*. Secara etimologi, *saeculum* memiliki arti ganda, yaitu ruang, dunia (*world, temporal world, cosmos, the universe, the created order*) dan zaman, masa kini, abad, waktu (*age, this age, century, time*) (Esposito, 1995: 20). Dari kata “sekuler” ini, muncul istilah “sekularisme”. Kata ini terdapat dalam beberapa bahasa; seperti dalam bahasa Inggris *secularism*, bahasa Perancis *seculaique*, dan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Ilmaniyah*.

“Sekularisme” adalah sebuah paham atau ideologi. Menurut Harvey Cox, sekularisme adalah sebuah ideologi yang mengandung ajaran-ajaran mengikat, sehingga sekularisme dapat menyerupai sebuah agama baru kemudian berpuncak pada *practical atheism*, dan hal tersebut tidak dapat dibenarkan (Cox, 1966: 2). Pendapat ekstrim dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi bahwa sekularisme adalah pemisahan agama dari kehidupan individu atau sosial. Tuhan dan hukum-hukum-Nya tidak boleh mengatur mereka seakan tuhan mereka adalah diri mereka sendiri, berbuat dan membuat hukum sesuai dengan seleranya, dan hal tersebut sangat bertentangan dengan syariat Islam (Qardhawi, 2000: 3).

Apabila sekularisme adalah paham, maka “sekularisasi” adalah sebuah proses. yakni proses pemisahan antara urusan-urusan dunia dengan urusan agama. Sekularisasi dalam konteks ini berarti transformasi dari sebuah negara agama menuju kepada negara sekuler. Dalam hal

ini Donald Eugene Smith (Smith, 1996: 115-116) menjelaskan bahwa secara garis besar sekularisasi ditandai oleh, (1) pemisahan antara pemerintahan dan ideologi-ideologi keagamaan dan struktur-struktur kegerejaan, (2) pengembangan (ekspansi) pemerintahan untuk melaksanakan peranan mengatur lapangan sosio-ekonomis yang dulu dilakukan oleh struktur-struktur keagamaan, (3) transvaluasi budaya politik untuk menekankan tujuan-tujuan duniawi yang non-transenden dan cara-cara yang rasional dan pragmatis, yang berupa nilai-nilai politik sekuler, (4) Dalam bentuk sekularisasi yang lebih radikal lagi, kekuasaan (dominasi) pemerintah terhadap keyakinan-keyakinan agama, peribadatan dan struktur-struktur keagamaan.

Pemaknaan yang agak berbeda mengenai istilah "sekularisasi" dikemukakan oleh Betty R. Scarf (Scarf, 1995: 35-40). Menurut Scarf, ada tiga makna berkaitan dengan istilah tersebut. *Pertama*, mengacu pada aspek kelembagaan, yaitu adanya pemisahan antara lembaga-lembaga keagamaan dengan lembaga-lembaga lainnya. Berdasarkan hal ini maka sebuah masyarakat yang menjauhkan dari institusi keagamaan disebut sebagai masyarakat sekuler. *Kedua*, pemaknaan berkaitan dengan sikap kepercayaan, pemikiran dan sikap terhadap sains dan moral serta pandangan-pandangan umum tentang dunia. Hal ini bisa ditemui pada orang-orang yang tetap rajin beribadah sesuai dengan agamanya namun mereka memisahkan usaha pencapaian kehidupan dunia dengan nilai-nilai keagamaan yang dipeluknya. *Ketiga*, sekularisasi dimaknai sebagai suatu penafsiran baru para pemeluk agama terhadap keyakinan dan ajaran-ajaran agamanya serta peribadatnya. Berdasarkan makna ini, sekularisasi dipergunakan untuk melakukan

reaktualisasi terhadap ajaran-ajaran agama. Dengan demikian, setiap upaya untuk mengaktualkan ajaran agama dalam kehidupan nyata dianggap sebagai upaya mensekulerkan agama (Ahida, 2007: 331). Untuk pemaknaan sekularisasi jenis yang ketiga ini, banyak dilakukan oleh para tokoh Muslim seperti Munawir Sjadzali, Nurcholish Madjid, dan kebanyakan para pembaharu Muslim Indonesia lainnya.

Dari berbagai uraian di atas setidaknya bisa diambil satu pemahaman bahwa baik istilah sekuler, sekularisme, ataupun sekularisasi, pada dasarnya memiliki pengertian yang serupa yaitu adanya pembedaan, pemisahan atau setidaknya usaha-usaha memisahkan antara hal-hal yang berkaitan dengan agama dan hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia. Sedangkan sekularisasi di dalam Islam, juga sering dimaknai sebagai upaya-upaya pembaharuan dan pengaktualisasian ajaran-ajaran Islam agar sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman.

B. Gagasan dan Kebijakan Sekularisme Mustafa Kemal

Mustafa Kemal dikenal sebagai tokoh yang pertama kali menerapkan konsep sekularisme di negeri Muslim, yaitu Turki. Sekularisasi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal ini antara lain dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa agama telah dirusak dan banyak disalahgunakan oleh para penguasa Turki untuk melanggengkan kekuasaannya, sehingga menyebabkan kemunduran. Kebijakan ini muncul sebagai kritik balik terhadap kekuasaan Usmani yang menggunakan symbol-simbol keagamaan sebagai alat legitimasi kekuasaan politiknya.

Usaha-usaha sekularisasi dilakukan oleh Mustafa Kemal di berbagai bidang. Salah satu di antaranya adalah di bidang

politik. Berbeda dengan fatwa politik tradisional Turki yang memandang bahwa kedaulatan terletak di tangan Tuhan yang dijalankan oleh Sultan atau khalifah. Bagi Mustafa Kemal yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Barat berpandangan bahwa kedaulatan harus berada di tangan rakyat. Ide ini diterima oleh Majelis Nasional Agung pada tahun 1920. Setahun kemudian disusun konstitusi baru dan pasal 1 menjelaskan bahwa kedaulatan adalah milik rakyat. Dengan demikian yang berdaulat di Turki bukan lagi sultan, tetapi rakyat (Nasution, 1996: 149). Selanjutnya dengan alasan fakta sejarah umat Islam, Mustafa Kemal mengusulkan agar dua fungsi yang dipegang oleh sultan Turki, yakni fungsi spiritual dan fungsi temporal dipisahkan. Kemudian, Mustafa Kemal mengusulkan agar jabatan sultan dengan kekuasaan temporal yang ada padanya dihapuskan saja untuk menghindari adanya dualisme pada kekuasaan eksekutif. Yang dipertahankan adalah jabatan khalifah dengan kekuasaan spiritualnya (Nasution, 1996: 149). Ini berarti Mustafa Kemal menghendaki agar kekuasaan sultan Turki, dalam hal ini khalifah benar-benar hanya menyangkut bidang keagamaan saja, dan tidak perlu mencampuri urusan-urusan ketatanegaraan.

Upaya lain yang dilakukan oleh Mustafa Kemal adalah menghilangkan institusi-institusi keagamaan yang ada di dalam pemerintahan. Pada tahun 1924 Biro Syaikh a-Al-Islam dihapuskan, demikian pula Kementerian Syari'at juga dihapuskan. Hukum syari'at dalam soal perkawinan digantikan oleh hukum Swiss. Perkawinan dilakukan bukan lagi menurut syari'at tetapi menurut hukum sipil. Wanita mendapat hak cerai yang sama dengan kaum pria. Dengan meninggalkan hukum syari'at dan hukum adat, Undang-undang

baru juga dibuat seperti hukum dagang, hukum pidana, hukum laut, hukum obligasi dan lain-lain. Hukum-hukum tersebut diambil dari hukum Barat (Nasution, 1996: 149).

Untuk mengurangi keterkaitan masyarakat terhadap tradisi keagamaan, pada tahun 1925 semua perkumpulan tarekat dihapuskan. Bersamaan dengan itu pembentukan organisasi sosial dan politik yang berdasarkan agama juga dilarang seperti partai Islam, partai Kristen, dan sebagainya.

Sekularisasi di bidang pendidikan ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Penyatuan pendidikan pada tahun 1924. Seluruh sekolah-sekolah diletakkan di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan. Madrasah-madrasah ditutup untuk diganti oleh sekolah yang akan membina imam dan khatib. Di Universitas Istanbul didirikan Fakultas Ilahiyat. Selanjutnya pendidikan agama ditiadakan di sekolah-sekolah. Pendidikan agama menjadi tanggungjawab pribadi dan keluarga. Di samping itu jumlah guru agama dikurangi dan jumlah masjid dibatasi.

Dalam lapangan kebudayaan, Mustafa Kemal melaksanakan reformasi bahasa. Ia mengambil kebijakan Turkifikasi dengan membersihkan kata-kata Arab dan Persia dari bahasa Turki. Adzan dikumandangkan dalam bahasa Turki, Alquran diterjemahkan ke dalam bahasa Turki, demikian pula khutbah Jum'at diberikan dalam bahasa Turki.

Di samping reformasi bahasa, Mustafa Kemal berusaha menghilangkan semua simbol-simbol dan upacara-upacara, baik upacara adat maupun keagamaan yang mencerminkan ketradisionalnya. Hal ini ia lakukan dalam upayanya untuk

menunjukkan kepada dunia, terutama dunia Barat bahwa Turki adalah negara yang beradab dan berbudaya tinggi sejajar dengan negara-negara maju lainnya di dunia. Pada tahun 1925-an, dikeluarkan peraturan larangan pemakaian *tarbus*, menyegel semua *tekkes* (tempat pertemuan) para Darwis serta kaum tarekat, melarang praktek jampi-jampi dan klenik dalam rangka pengobatan terhadap suatu penyakit dan lain-lain (An-Nadwi, 1993: 60-61). Di sisi lain ia menyuruh mengganti pakaian-pakaian yang dianggapnya tradisional dengan pakaian Eropa pada umumnya.

D. Respon Para Ulama` Mesir

Pada bagian ini akan diuraikan tentang bagaimana respon para ulama` atas sekularisme Mustafa Kemal. Ada empat tokoh ulama` Mesir yang menjadi fokus pada kajian ini, yaitu Rasyid Ridha, Ali Abd al-Raziq, Thaha Husein dan Hassan al-Banna. Di samping karena keterbatasan, ke empat tokoh ini menurut penulis cukup mewakili karena paling banyak memberikan responnya terhadap gagasan dan kebijakan sekularisme Mustafa Kemal dibanding para ulama` Mesir lainnya.

1. Rasyid Ridha (1865-1935)

Di antara gagasan Mustafa Kemal yang paling banyak mendapat perhatian dan respon Rasyid Ridha adalah mengenai kebijakan penghapusan khilafah di Turki. Ia adalah salah satu tokoh yang tidak setuju atas kebijakan tersebut. Menurut pemikiran Ridha, mendirikan khilafah hukumnya adalah wajib. Ia mendasarkan keyakinannya pada al-Qur`an surat al-Nisa` ayat 59 yang memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah, Rasul dan *Ulil Amri*. Dengan demikian tindakan Mustafa Kemal dan para pendukungnya yang menghapuskan

khilafah di Turki bertentangan dengan ajaran al-Qur`an dan merugikan umat Islam.

Islam menurut Ridha adalah satu-satunya sumber yang dapat memberi jalan keluar bagi segala aspek kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, ia mengajak umat Islam untuk kembali kepada pokok-pokok ajaran Islam (Rosenthal, 1965: 82). Ia juga menjelaskan bahwa sistem kekhalifahan adalah suatu kemestian yang harus diterima bagi pemerintahan Islam berdasarkan fakta-fakta sejarah umat Islam. Pada khalifah-lah kekuasaan temporal dan spiritual berada dan umat Islam wajib mentaatinya. Oleh karena itu lembaga tersebut harus dipertahankan (Rosenthal, 1965: 77).

Penentangan Ridha atas keputusan Mustafa Kemal menghapuskan lembaga khilafah tersebut diikuti dengan kampanye untuk menghidupkan kembali lembaga kekhalifahan. Kampanye tersebut lengkap dengan sejumlah gagasan tentang tehnik pelaksanaan, persyaratan calon yang akan dipilih, dan siapa yang bertanggung jawab, dan sebagainya (Syadzali, 1990: 135-136). Gagasan-gagasan tersebut ditulis dalam sebuah bukunya yang berjudul *al-Khilafat wa al-Imamat al-Uzma* (1865-1935 M).

Selain berkaitan dengan kekhalifahan di atas, Rasyid Ridha juga menentang usaha Mustafa Kemal untuk menerjemahkan Al-Qur`an ke dalam bahasa Turki. Baginya, Usaha menerjemahkan Al-Qur`an dalam bahasa apapun adalah merupakan pelecehan terhadap kesucian Alquran itu sendiri. Oleh karena itu, hal itu wajib dicegah. Pandangan tersebut sejalan dengan fatwa para ulama al-Azhar, sehingga berhasil menggoyahkan pendirian Mehmed Aqif, sastrawan religius Turki yang diberi tugas oleh Mustafa Kemal menerjemahkan al-Qur`an ke dalam bahasa Turki (Mortimer, 1982: 131-132). Akibatnya, penyelesaian terjemahan

tersebut sempat tertunda. Dari sini tampak cukup kuat pengaruh pandangan ulama-ulama dan para pemimpin Islam sebagai respon terhadap berbagai upaya pembaharuan.

Gagasan lain Mustafa Kemal yang ditentang oleh Rasyid Ridha adalah gagasan nasionalisme. Penentangan ini bahkan telah dimulai sejak gerakan nasionalisme tersebut dikumandangkan oleh Turki Muda. Menurutnya ide nasionalisme telah menjadi penyebab mundurnya umat Islam karena terjadi perpecahan dan permusuhan di kalangan mereka. Padahal menurutnya, Islam sendiri melarang umat Islam bermusuhan satu sama lain, baik itu yang timbul karena adanya perasaan terikat dengan kelompok, negara ataupun wilayah tempat tinggalnya, yang bertentangan dengan persaudaraan atas dasar keagamaan (*Ukhuwah diniyah*) (Esposito, 1982: 92-93).

Dalam pandangan Ridha, Perasaan atau semangat berkelompok (*group feeling, 'ashabiyah*) di kalangan orang-orang Arab pada umumnya, cenderung memiliki semangat untuk membela dan melindungi orang-orang dalam kelompok itu dan memberikan bantuan apa saja yang diperlukan walaupun itu adalah perbuatan salah dan tidak adil. Untuk memperkuat pendapatnya, Ridha mengutip sebuah hadis Nabi: "Perasaan berkelompok (*'Ashabiyah*) adalah perasaan seseorang yang mendorong orang itu untuk melakukan dosa" (HR Imam Ahmad) (Esposito, 1982: 92-93).

Dengan demikian ia menentang nasionalisme dalam pengertian cinta tanah air. Sebab hal tersebut akan memecah belah kesatuan umat Islam. Kesatuan dan persaudaraan umat Islam tidaklah didasarkan atas bahasa, tanah air atau bangsa, akan tetapi berdasarkan atas keyakinan yang sama. Dengan demikian penentangan Ridha atas ide nasionalisme

yang dikumandangkan oleh Mustafa Kemal di Turki, karena khawatir ide tersebut akan memecah belah umat Islam.

Berkaitan dengan pengadopsian ilmu pengetahuan dan teknologi dari Barat oleh Mustafa Kemal, tidak ada komentar-komentar Rasyid Ridha yang secara langsung ditujukan kepadanya. Namun demikian apabila dilacak dari tulisan-tulisannya, tergambar bahwa Rasyid Ridha adalah termasuk tokoh yang setuju dengan pengadopsian ide-ide Barat tersebut. Akan tetapi pengadopsian ide-ide Barat tersebut tidaklah dilakukan secara total sebagaimana yang dilakukan oleh Mustafa Kemal, namun dengan cara berhati-hati disesuaikan dengan ajaran Islam.

Islam sendiri menurut Ridha tidak melarang umat Islam mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi sebaliknya, Islam menganjurkan bahkan mewajibkan untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi agar bisa menjadi maju. Untuk itu umat Islam harus selalu berupaya memperoleh ilmu pengetahuan dari manapun termasuk menerima ilmu pengetahuan yang berasal dari Barat (Nasution, 1996: 75. Begitu antusiasnya Ridha terhadap ilmu pengetahuan, ia bahkan menganjurkan agar di sekolah-sekolah, baik di madrasah maupun di sekolah tradisional ditambahkan mata pelajaran-mata pelajaran umum.

Menurut Ridha, mengambil ilmu pengetahuan dari Barat pada dasarnya adalah mengambil kembali ilmu pengetahuan dari Islam. Barat maju karena mereka berani mengambil ilmu pengetahuan dari Islam. Jika umat Islam mengambil ilmu pengetahuan dari Barat berarti berarti mengambil kembali ilmu pengetahuan yang telah dimiliki Islam (*Ensiklopedia Islam*, tt: 163).

2. Ali Abd al-Raziq (1888-1966)

Ali Abd al-Raziq juga termasuk salah satu yang cukup banyak memberikan responnya terhadap kebijakan Mustafa Kemal menghapuskan khilafah. Namun berbeda dengan Rasyid Ridha yang menolak, Ia justru sebaliknya, yaitu menyetujui atas kebijakan tersebut. Pemikiran tersebut bisa dibaca dari bukunya yang berjudul *al-Islam wa al-Ush-l al-Hukm*. Buku tersebut diterbitkan tepat tiga belas bulan setelah Mustafa Kemal Ataturk mengumumkan dihapuskannya sistem khilafah di Turki pada tahun 1924.

Isi buku ini sejalan dengan keputusan Mustafa Kemal Ataturk yang mengingkari eksistensi khilafah dalam ajaran Islam. Buku ini pada intinya membahas tentang prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam dengan melihat dari empat sudut, yakni al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Sejarah Islam. Dari sudut pandang tersebut Ali Abd al-Raziq menyimpulkan bahwa al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai konsep negara atau pemerintahan (Binder, 1988: 137), demikian pula tidak pernah menentukan suatu bentuk atau sistem pemerintahan tertentu yang harus diikuti oleh umat Islam di berbagai negara. Menurutnya, ayat-ayat Al-Qur'an yang sering dianggap para intelektual Muslim sebagai referensi untuk mendukung prinsip-prinsip kenegaraan atau kekuasaan politik dalam Islam, bila digunakan dalam konteks kenegaraan masih bersifat sangat umum. Ayat-ayat tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang bagaimana seharusnya bentuk negara dan sistem pemerintahan yang harus dibangun di dalam Islam. Dengan demikian, umat Islam mempunyai kebebasan mutlak untuk menata dan

mengatur persoalan-persoalan yang menyangkut kenegaraan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kemampuan intelektual yang mereka miliki dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan kebutuhan zaman al-Raziq, 1925: 103).

Ali Abd al-Raziq juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diutus hanya semata untuk mendakwahkan agama murni tanpa bermaksud untuk mendirikan negara. Nabi tidak mempunyai kekuasaan duniawi, negara atau pemerintahan. Nabi tidak mendirikan kerajaan dalam arti politik atau sesuatu yang mirip dengan kerajaan. Nabi bukanlah raja, sebagaimana para nabi sebelumnya (Raziq, 1925: 12-20 & 76). Dalam pandangannya, sistem khilafah tidak lebih dari sebuah fenomena sejarah dan bukan kewajiban agama. Menurutnya pula, jika ditinjau secara historis dinamika perjalanan sejarah ketatanegaraan umat Islam sejak zaman *Khulafa al-Rasyidun* sampai kepada perkembangan berikutnya, ternyata sistem pemerintahan yang dianut juga sangat bervariasi. Dalam hal pengangkatan khalifah atau kepala negara misalnya, tidak ada suatu pola yang baku dan seragam.

Dengan demikian, tampak bahwa pendirian Ali Abd al-Raziq mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan sangat fleksibel. Apapun bentuk dan sistemnya sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan memang relevan dengan kondisi yang melingkupi suatu umat tetap diperbolehkan.

Berdasarkan hal di atas Ali Abd al-Raziq setuju mengenai penghapusan khilafah yang dilakukan oleh Mustafa Kemal. Tindakan Mustafa Kemal menghapuskan sistem khilafah di Turki Usmani dalam pandangannya bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak pula menyalahi hukum Islam. Ia memperkuat

pendapatnya dengan mengemukakan argumentasi bahwa kekhilafahan bukanlah rezim keagamaan, tetapi murni duniawi. Kalaupun kekhilafahan itu ada, maka para khalifah tidak bisa menggantikan fungsi kenabian Muhammad karena Muhammad bukanlah raja, sementara Nabi sendiri tidak pernah mencoba membuat suatu pemerintahan atau negara, beliau hanya seorang Rasul yang diutus Allah kepada umat untuk misi keagamaan dan bukan sebagai pemimpin politik. Atas dasar inilah, maka ia menyangkal bahwa telah terjadi transfer legitimasi politik dari Nabi kepada khalifah (Sjadzali, 1990: 142).

Dalam kaitannya dengan respon Ali Abd al-Raziq mengenai kebijakan-kebijakan Mustafa Kemal yang lain, penulis tidak menemukannya. Hanya ada satu tulisan yang berkaitan dengan westernisasi, namun tidak secara langsung berkaitan dengan responnya terhadap kebijakan Mustafa Kemal. Pada intinya tulisan Ali Abd al-raziq tersebut menganjurkan kepada kaum muslimin untuk berpacu dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial. Dalam upaya mencapai kemajuannya, kaum muslimin diberikan kebebasan meniru, memilih dan menentukan urusan dunianya selama itu bisa memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat yang sebesar-besarnya (Raziq, 1984: 54).

Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa Ali Abd al-Raziq tidak menyetujui adanya westernisasi, apabila hal tersebut dipahami sebagai peniruan secara buta terhadap apa saja yang datang dari Barat. Namun demikian ia juga tidak menolak apabila umat Islam meniru hal-hal dari Barat selama itu akan bisa memberikan kemajuan dan kemaslahatan bagi umat Islam.

3. *Thaha Husein (1889-1973)*

Thaha Husein adalah termasuk salah seorang pemikir Mesir yang setuju atas gagasan-gagasan Mustafa Kemal. Thaha Husein sebagaimana juga Mustafa Kemal menganggap bahwa pemerintahan Turki-lah yang menyebabkan umat Islam mundur. Penjajahan Turki telah membawa pada penghancuran peradaban Islam dan kemunduran umat Islam (Nasution, 1996: 87).

Sebagaimana Mustafa Kemal, Thaha Husein dalam rangka memajukan bangsa Mesir melontarkan gagasan yang cukup kontroversial yaitu sekularisasi. Gagasan ini cukup menghebohkan dan menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan terutama para intelektual Mesir.

Salah satu gagasan sekularisasinya adalah di bidang politik. Menurut Thaha Husein, antara agama dan negara telah terpisah. Keduanya tidak ada kaitannya. Berbeda dengan agama yang terdiri dari doktrin Ilahi, negara dibentuk atas dasar manfaat-manfaat amaliyah dan kepentingan praktis (Husein, 1973: 27). Penyatuan antara agama dan politik inilah yang menyebabkan Mesir menjadi mundur.

Oleh karena itu Thaha Husein menganjurkan untuk meniru Eropa agar Mesir bisa maju, yaitu dengan mensekulerkan sistem politik. Eropa maju karena mereka memisahkan antara agama dan politik dan tidak memandang bahwa politik adalah sesuatu yang sakral (Harahap, 1994: 109). Umat Islam hendaknya tidak mensakralkan atau menganggap suci pemerintahan yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah maupun oleh para khalifah.

Dalam pandangan Thaha Husein, pemerintahan yang dibangun oleh Nabi

Muhammad dan juga para penggantinya yaitu para *khulafa 'al-Rasyidun* bukanlah atas mandat Allah dan tidak berdasarkan atas wahyu. Hal inilah yang sering disalahkan oleh kaum muslimin. Umat Islam mengira semua itu adalah merupakan ketetapan wahyu, sehingga mereka tidak berani melanggarnya (Husein, 1973: 217).

Menurutnya, kekhalifahan yang dibangun pada masa *al-khulafa al-Rasyidun* pada dasarnya adalah sebuah perjanjian yang dilakukan antara kaum muslimin dan para khalifah yang dibaiatnya. Umat Islam seharusnya tidak terkecoh mengenai hal ini. Ucapan-ucapan atau pidato yang disampaikan oleh para khalifah mengenai perintah Tuhan, kekuasaan Tuhan dan ketaatan mereka kepada-Nya, seharusnya tidak dipandang bahwa kekuasaan itu turun dari Allah (Husein, 1973: 217-218).

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Thaha Husein, persoalan politik tidaklah dianggap sebagai sesuatu yang suci dan harus disakralkan. Persoalan politik adalah persoalan perjanjian antara rakyat dengan pemimpinnya. Dengan demikian hendaknya agama dipisahkan dari urusan politik.

Uraian di atas juga menunjukkan sikap kesetujuan Thaha Husein atas kebijakan Mustafa Kemal mengenai penghapusan khilafah, karena sistem khilafah bukanlah atas perintah Tuhan melainkan hasil kesepakatan oleh sekelompok manusia pada waktu itu dalam menjalankan sebuah pemerintahan.

Berkaitan dengan usaha meniru Barat, Thaha Husein juga sejalan dengan pandangan Mustafa Kemal. Thaha Husein menyetujui atas usaha-usaha meniru Barat untuk memperoleh kemajuan. Menurutnya, supaya Mesir maju dan modern, maka harus meniru jejak Eropa. Hal ini menurutnya mudah bagi Mesir. Karena Mesir adalah bagian dari negara Barat, dan

bukan bagian dari Timur. Peradaban Mesir didasarkan atas falsafat Yunani dan sistem hukum Romawi, dan bukan atas peradaban India dan Cina (Nasution, 1996: 87). Hal ini membuat Mesir mudah untuk mengikutinya.

Uraian di atas menunjukkan kesetujuan Thaha Husein atas gagasan Mustafa Kemal untuk meniru Barat secara total sebagai satu-satunya jalan agar negara menjadi maju. Keduanya mengakui bahwa Barat adalah lambang kemajuan. Pada saat ini Barat-lah yang menggenggam peradaban modern. Maka agar menjadi maju umat Islam harus menirunya.

Usaha meniru ini adalah sah, karena kemajuan tak lain adalah sebuah kelanjutan dari perkembangan manusia secara keseluruhan. Sedangkan perkembangan manusia itu bukanlah monopoli suatu kelompok tertentu, melainkan hak semua manusia. Dengan demikian mengambil alih peradaban modern Barat bukanlah sebuah pilihan, akan tetapi merupakan suatu keharusan.

4. Hassan al-Banna (1906-1949)

Hassan al-Banna termasuk tokoh yang menentang usaha-usaha sekularisme yang dilakukan oleh Mustafa Kemal. Al-Banna berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan segala sistem yang dibutuhkan bagi kehidupan umat manusia. Islam meliputi seluruh realitas hidup, yang termasuk di dalamnya mencakup negara dan tanah air atau pemerintahan dan rakyat (Al-Banna, 1982: 11). Dengan demikian Islam mengatur semua persoalan hidup, menentukan aturan dan hukum secara rinci dalam segala hal. Dengan keuniversalan ajaran Islam ini menurut Banna, maka Islam mampu memecahkan segala macam persoalan hidup dan bisa dijadikan sebagai

ideologi alternatif bagi kapitalisme Barat atau Marxisme.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka jelas bahwa al-Banna tidak setuju dengan kebijakan Mustafa Kemal yang menghapuskan sistem khilafah di Turki. Baginya Islam tidak bisa dipisahkan dari politik. Oleh karena itu, ketika Mustafa Kemal menghapuskan sistem khilafah di Turki, ia menentang dengan keras. Secara tegas, Hassan al-Banna menyatakan bahwa semua anggota Ikhwan al-Muslimin mengarahkan langkah, cita-cita, dan pekerjaan mereka kepada terbentuknya pemerintahan Islam dengan upaya mengembalikan jabatan dan fungsi khalifah pada posisi yang seharusnya. Selanjutnya organisasi tersebut secara aktif menyuarakan pentingnya pemberlakuan aturan-aturan Islam dalam berbagai sendi kehidupan.

Dalam kaitan dengan kebijakan westernisasi total yang dilakukan oleh Mustafa Kemal, ia tidak sependapat dengan Rasyid Ridha yang masih memberi peluang untuk meniru Barat. Menurut al-Banna, untuk meraih kejayaan umat Islam terutama di Mesir tidak perlu meniru Barat. Menurut al-Banna, umat Islam telah memiliki modal yang kuat yakni keyakinan pada Allah swt. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam dan menjadikannya sebagai pandangan dan pedoman hidup, bangsa Mesir akan bangkit kembali. Dominasi Barat telah menyebabkan Mesir kehilangan jiwanya, degradasi moral telah terjadi di mana-mana dan telah menjadi penyebab lemah dan terbunuhnya pengaruh agama dalam kehidupan negeri ini. Oleh karena itu tidaklah benar dikatakan bahwa Islam menghendaki kebodohan, Islam memperkuat ilmu dan teknologi dan menggunakannya dalam kerangka Islam, serta dalam konteks terencana, untuk menghindari proses westernisasi dan

sekularisasi dalam diri masyarakat Islam (Esposito, 1994: 136).

Dalam pandangan al-Banna, Barat dengan penemuan-penemuannya tetap tidak mampu memberikan cahaya kebenaran, harapan, keyakinan bagi manusia ataupun jalan keluar bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan untuk mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Kehidupan menurut cara Barat hanya mampu memberikan sekedar kenikmatan lahiriyah berupa dosa, cinta birahi, minuman keras, main wanita dan hura-hura (Al-Banna, 1982: 130131). Namun demikian mereka tidak mampu melepaskan diri dari kesempitan hidup dan tekanan jiwa.

Berdasarkan hal di atas, al-Banna membenci terhadap pembaharuan-pembaharuan yang meniru Barat. Ia menegaskan bahwa tidak ada gunanya bekerja sama dengan pihak Barat dalam bidang apapun (Al-Kilani, 1992: 198). Semangat anti Barat ini telah terlihat sejak Banna berusia 13 tahun. Ketika terjadi pemberontakan anti Inggris pada tahun 1919, Banna tidak mau ketinggalan ikut memberontak. Semangat anti Barat, khususnya Inggris ini kemudian semakin mengental setiap kali ia melewati wilayah Terusan Suez yang diduduki pasukan Inggris.

D. Penutup

Berdasarkan dari uraian di atas disimpulkan bahwa dari gagasan dan kebijakan-kebijakan Mustafa Kemal yang paling banyak mendapatkan respon dari para ulama Mesir adalah mengenai penghapusan khilafah. Dalam hal ini, pendapat mereka terpecah menjadi dua, yaitu ada yang menentang dan ada yang setuju. Mereka yang menentang adalah Rasyid Ridha dan Hassan al-Banna. Sedangkan yang menyetujui kebijakan tersebut adalah Ali abd al-Raziq dan

Hassan al-Banna. Sedangkan hal-hal lain yang juga banyak mendapatkan respon adalah berkaitan dengan usaha Mustafa Kemal meniru Barat. Dalam hal ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama` Mesir. Rasyid Ridha dan Ali abd al-Raziq sebagai misal, menyetujui atas usaha meniru Barat akan tetapi harus menyaring terhadap hal-hal yang baik saja. Menurut Thaha Hussein, meniru Barat harus dalam segalanya baik itu yang baik maupun yang buruk. Sedangkan menurut Hassan al-Banna, umat Islam tidak boleh meniru Barat dalam hal apapun.

Daftar Pustaka

- Ahida, Ridha "Sekularisasi: Refleksi terhadap Konsep Ketuhanan," dalam *Tajdid* XIV, no 2 (September 2007).
- Al-Banna, Hasan "Masa Kebangkitan Baru", dalam John L. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*. Penerjemah Machnun Husein (Jakarta: CV. Rajawali, 1982).
- Binder, Leonard *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies* (Chicago: The University of Chicago Press, 1988).
- Cox, Harvey, *The Secular City* (New York: The Macmillan Company, 1966).
- Enayat, hamid *Modern Islamic Political Thought* (London: Macmillan Press, 1982)
- Ensiklopedia Islam*, jilid IV (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, tt).
- Esposito, John L. *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World* (New York: The Oxford University Press, 1995).
- Esposito, J. L., *Ancaman Islam Mitos atau Realitas?* Penerjemah Alwiyah Abdurrahman dan Missi (Bandung: Mizan, 1994).
- Harahap, Syahrin, *Al-Qur`an dan Sekularisasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994).
- Hawwa, Sa`id, *Jalan Tuhani Bimbingan Tasawuf untuk Para Aktifis Islam*, Penerjemah Drs. Khairul Rafie` dan Ibnu Thaha Ali cet. 1 (Bandung: Mizan, 1995).
- Husein, Thaha, "Al-Fitnah al-Kubra", dalam *Al-Majmu`at al-Kamilah li Mu`allafat al-Duktur Husein*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnany, 1973).
- Husein, Thaha *Mustaqbal al-Saqafat fi Mishr* dalam *Al-Majm-at al-Kamilat li Mu`allafat al-Duktur Thahha Husein*, Juz V (Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnany, 1973).
- Al-Kilani, Ismail. *Sekularisme, Upaya memisahkan agama dari negara*. Penerjemah Kahur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1992).
- Lewis, Bernard. *The Emergency of Modern Turkey*. (London: Oxford University Press, 1968).
- Mortimer, Edward. *Faith and Power: Politics of Islam*. (New York: Random House, 1982).
- An-Nadwi, Abu al-Hasan Ali al-Husni *Pertarungan antara Alam Pikiran Islam dengan Alam Pikiran Barat*, diterjemahkan oleh Mahjuddin Asaf dengan judul: (Bandung: al-Ma`arif, 1993).
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).

- Qardhawi, Yusuf. *Sekuler Ekstrim*, terj., Nabhari Idris, cet. Ke-1. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000).
- Rais, M. Amin "Kata Pengantar", dalam David Sagiv, *Islam Otentisitas Liberalisme*, Penerjemah oleh Yudian W. Asmin (Yogyakarta: LKiS, 1995).
- Al-Raziq, Ali Abd, "Kekhilafahan dan Dasar-dasar Kekuasaan," dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*. Penerjemah Machnun Husein (Jakarta: CV. Rajawali, 1984).
- Al-Raziq, Ali Abd *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*, (Mesir: Syirkah Musahamah, 1925)
- Ridha, Rasyid "Patriotisme, Nasionalisme dan Semangat Persatuan dalam Islam," dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan* (Jakarta: CV Rajawali, 1982).
- Rosenthal, Erwin, I.J. *Islam in Modern State "Turkey."* New York: Cambridge University Press, 1965.
- Sadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI-Press, 1990.
- Scarf, Betty, *Kajian Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995).
- Smith, Donald Eugene *Agama dan Modernisasi Politik*, Penerjemah Drs. Machnun Husen (Jakarta: CV. Rajawali)
- Syalabi, Ahmad *Mausu'at at-Tarikh al-Islami wa al-Hadarat al-Islamiyah*, jilid 5, (Kairo: Maktabah alMahdah al-Misriyah, 1976).

Al-Fitrah

merupakan jurnal yang diterbitkan satu tahun sekali
setiap bulan April oleh Progam Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)
Jurusan Tarbiyah STAIN Jember
sebagai media informasi dan pengetahuan tentang
kajian ilmu-ilmu Pendidikan Agama Islam

Alamat Redaksi
Jl. Jumat 94 Mangli Jember
Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 427005
E-mail: alfitrah.stainjbr@gmail.com

